



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis, 31 Juli 2025



RINGKASAN BERTA HARI INI

DPRD Sidoarjo Aspiratif dan Responsif, Ketua Abdullah Nashih: Kami Hadir untuk Warga

SIDOARJO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmennya sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya mengawal kebijakan, tetapi juga menjadi mitra yang aspiratif rakyat.

Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam sesi rapat rutin, Senin (30/7), membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian khusus adalah keluhan warga di beberapa desa yang mengalami kesulitan akses ke layanan kesehatan dasar. Ketua DPRD, Abdullah Nashih, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pemerintah agar masalah ini segera terpecahkan.

"Kami tidak ingin menjadi dewan yang hanya duduk di balik meja. Kami turun ke lapangan, mendengar, dan merespon cepat. Karena kepercayaan rakyat adalah amanah yang tidak boleh kami abaikan," ujar Abdullah dalam sebuah wawancara di ruang kerjanya, baru-baru ini.



Abdullah Nashih
Ketua DPRD Sidoarjo



MERAKAT: Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nashih saat berdiskusi dengan warga.

Menyapa para anggota dewan tak hanya datang dan mengucil, tetapi juga berupaya memberikan solusi konkret. Bahkan, tidak sedikit anggota DPRD yang langsung mengunjungi masyarakat dengan OPD terkait untuk persentasi penanganan.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdullah Nashih, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pemerintah agar masalah ini segera terpecahkan.



tersebut, langsung pertemuan, baik itu soal pelayanan publik, hingga di tingkat desa. Nashih juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pemerintah agar masalah ini segera terpecahkan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, akan segera ditindaklanjuti," ujar Nashih.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BANTUAN: Warga mengambil beras di Balai Desa Wedi, Gedangan, kemarin (30/7). Masing-masing keluarga menerima 20 kilogram per bulan.

4.000 Warga Dapat 80 Ton Beras Gratis Perubahan Anggaran Keuangan 2025 Terancam Gagal Disahkan

Eksekutif-Legislatif Beda Pendapat

SIDOARJO - Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 terancam gagal. Pemkab meyakini, pengesahan PAK tidak bisa dilakukan jika perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 tidak disahkan.

Pasalnya, hari ini (31/7) menjadi batas akhir pengesahan perda tersebut. Jika gagal disahkan, Pemkab Sidoarjo terpaksa menyusun pertanggungjawaban dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dampaknya, pengesahan Perubahan APBD (PAK) 2024 dinilai akan tertunda.

Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Subandi, mengatakan bahwa DPRD akan terus mengawal pemerintah agar masalah ini segera terpecahkan.



TERIMA MASUKAN: Bupati Sidoarjo Subandi (dua dari kanan) menerima kunjungan dari DPRD Sidoarjo.

POLEMIK PEMBAHASAN PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN

Pembahasan boleh jalan, tapi soal pengesahan tetap bergantung pada status perda pertanggungjawaban ini.

M. AINUR RAHMAN

100 Hari Kinerja Subandi-Mimik: Banyak Capaian, Evaluasi Tetap Berlanjut



TERJAN LANGSUNG: Bupati Sidoarjo Subandi bersama Forkompida meninjau banjir di Jalan Raya Pongor.

Salah satu capaian yang telah terwujud adalah perbaikan infrastruktur jalan di beberapa desa. Selain itu, program pelatihan petani juga telah dilaksanakan, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

"Kami akan terus mengawal pemerintah agar masalah ini segera terpecahkan," ujar Subandi.



DANAR: Bupati Sidoarjo Subandi saat meninjau banjir di Jalan Raya Pongor.

Salah satu capaian yang telah terwujud adalah perbaikan infrastruktur jalan di beberapa desa. Selain itu, program pelatihan petani juga telah dilaksanakan, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

"Kami akan terus mengawal pemerintah agar masalah ini segera terpecahkan," ujar Subandi.



PEDELI: Bupati Sidoarjo Subandi memberikan bantuan kepada warga di desa.



Bupati H. Subandi, SH, M.Kn. Wakil Bupati Sidoarjo H. Mimik Idayana.

Salah satu capaian yang telah terwujud adalah perbaikan infrastruktur jalan di beberapa desa. Selain itu, program pelatihan petani juga telah dilaksanakan, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

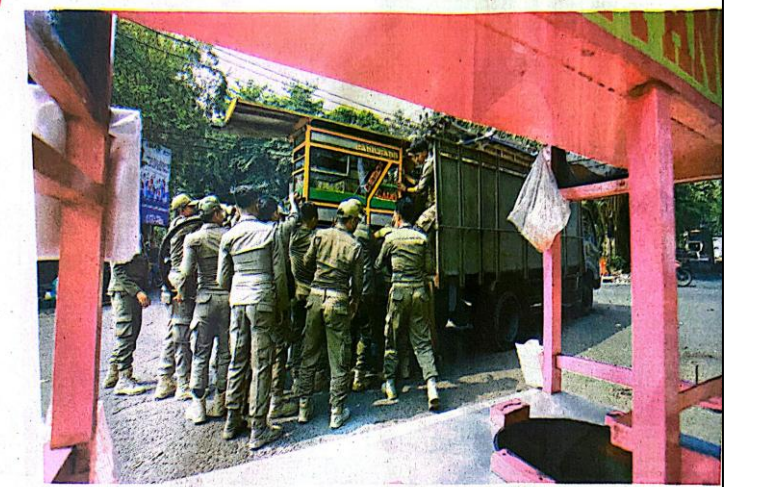
"Kami akan terus mengawal pemerintah agar masalah ini segera terpecahkan," ujar Subandi.

Salah satu capaian yang telah terwujud adalah perbaikan infrastruktur jalan di beberapa desa. Selain itu, program pelatihan petani juga telah dilaksanakan, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

"Kami akan terus mengawal pemerintah agar masalah ini segera terpecahkan," ujar Subandi.

Salah satu capaian yang telah terwujud adalah perbaikan infrastruktur jalan di beberapa desa. Selain itu, program pelatihan petani juga telah dilaksanakan, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

"Kami akan terus mengawal pemerintah agar masalah ini segera terpecahkan," ujar Subandi.



LANGGAR ATURAN: Petugas satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Sultan Agung, dekat Alun-Alun Sidoarjo, kemarin (30/7). Sebelumnya, petugas sudah memasang papan larangan berjualan di sana.

Belasan Rombong PKL di Area Alun-Alun Diangkut Satpol PP Pastikan Tepat Sasaran, Penyaluran Bantuan Pangan di Sidoarjo



Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana telah menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, akan segera ditindaklanjuti," ujar Subandi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, akan segera ditindaklanjuti," ujar Subandi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, akan segera ditindaklanjuti," ujar Subandi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, akan segera ditindaklanjuti," ujar Subandi.

Diperbanyakan oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ASPIRATIF: Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih saat turun langsung ke lapangan.

ASPIRATIF: Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih saat turun langsung ke lapangan.

ASPIRATIF: Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih saat turun langsung ke lapangan.

DPRD Sidoarjo Aspiratif dan Responsif, Ketua Abdullah Nasih: Kami Hadir untuk Warga

SIDOARJO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmennya sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya mengawal kebijakan, tetapi juga menjadi corong utama aspirasi rakyat. Kinerja anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dinilai semakin responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari keseriusan mereka dalam menyerap, menindaklanjuti, dan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan warga dan berbagai kalangan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan, seluruh anggota legislatif aktif turun ke lapangan untuk memastikan suara masyarakat benar-benar didengar. Kegiatan reses menjadi salah satu sarana efektif dalam menyerap aspirasi secara langsung. Dalam setiap

PKB, menegaskan bahwa DPRD bukan hanya institusi formal yang berkuat dengan rapat-rapat dan regulasi. Ia menyebut DPRD sebagai "rumah aspirasi" tempat rakyat menyampaikan keluh kesah dan harapannya.

"Kami tidak ingin menjadi dewan yang hanya duduk di balik meja. Kami turun ke lapangan, mendengarkan, dan merespons cepat. Karena kepercayaan rakyat adalah amanah yang tidak boleh kami abaikan," ujar Abdullah dalam sebuah wawancara di ruang kerjanya, baru-baru ini.

TURUN LANGSUNG SERAP ASPIRASI MASYARAKAT

Kegiatan reses dan serap aspirasi menjadi momen penting bagi anggota DPRD untuk menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat. Tidak jarang, permintaan perbaikan jalan, drainase



Abdullah Nasih
Ketua DPRD Sidoarjo



MERAKYAT: Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih saat turun langsung ke lapangan.

masa reses, para anggota dewan tak hanya datang dan mencatat, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi konkret. Bahkan, tidak sedikit anggota DPRD yang langsung menghubungkan masyarakat dengan OPD terkait untuk percepatan penanganan.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdullah Nasih, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua kebijakan pembangunan berpihak pada kepentingan rakyat. "Kami hadir sebagai penyambung lidah rakyat. Aspirasi warga adalah dasar dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan," ujarnya.

Tak hanya di ruang rapat, banyak anggota dewan juga aktif melalui media sosial dan pos pengaduan, menjadikan DPRD lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Langkah ini mendapat apresiasi dari warga, yang merasa suara mereka semakin diperhatikan.

Respons cepat, keterbukaan, dan komitmen anggota DPRD Sidoarjo menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang partisipatif dan demokratis.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja para wakil rakyat, terutama di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Abdullah Nasih, mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat.

Sebagai lembaga representatif, DPRD Sidoarjo aktif menyerap dan menindaklanjuti keluhan, harapan, dan kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan. Baik di bidang infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, UMKM, hingga penanganan banjir, para anggota dewan turun langsung ke lapangan, berdialog, dan memperjuangkan solusi bersama eksekutif.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdullah Nasih, yang juga merupakan politisi muda dari

tersumbat, kurangnya penerangan, bahkan soal pelayanan publik, langsung ditangani melalui koordinasi lintas OPD.

Misalnya, saat beberapa wilayah di Kecamatan Tanggulangin dan Candi dilanda genangan air karena drainase yang buruk, Ketua DPRD bersama Komisi C turun langsung meninjau lokasi. Dalam waktu singkat, mereka memfasilitasi koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan normalisasi dan pembenahan.

"Warga tidak butuh janji. Mereka butuh solusi. Karena itu kami berupaya segala yang bisa kami kawal, kami kawal," tambah Abdullah.

MENDORONG ANGGARAN BERBASIS KEBUTUHAN RAKYAT

Kinerja aspiratif DPRD Sidoarjo juga tercermin dari pengawalan kebijakan anggaran daerah yang pro-rakyat. Dalam pembahasan APBD, para pimpinan dan anggota dewan secara aktif mendorong agar alokasi belanja daerah lebih berpihak kepada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, dan infrastruktur desa.

Abdullah Nasih menyebut bahwa DPRD berkomitmen untuk menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan inklusif. Misalnya, pada APBD 2025, DPRD mendorong penambahan anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis, perluasan beasiswa pendidikan, serta peningkatan dana hibah keagamaan dan pondok pesantren.

"Kami ingin anggaran tidak hanya terserap, tapi tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat. APBD itu milik rakyat, bukan milik pejabat," tegasnya.

FASILITASI UMKM DAN GENERASI MUDA

DPRD juga memberi perhatian khusus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM. Program Kurda (Kredit Usaha Rakyat Daerah) yang digagas bersama eksekutif berhasil disalurkan kepada ribuan pelaku usaha mikro. Selain itu, DPRD mendorong penyediaan pelatihan, pendampingan legalitas usaha, hingga bantuan pemasaran.

Di sisi lain, sektor pemuda dan olahraga juga mendapat dukungan serius dari legislatif. Abdullah Nasih dan jajaran DPRD kerap hadir dalam turnamen olahraga lokal, festival seni pelajar, hingga pelatihan kepemudaan.

"Sidoarjo punya bonus demografi yang besar. Generasi mudanya harus kita siapkan. Mereka bukan hanya masa depan, tapi kekuatan masa kini," ucap Abdullah.

TERBUKA TERHADAP KRITIK DAN KOLABORATIF

DPRD Sidoarjo juga dikenal terbuka terhadap masukan dan kritik. Forum-



SINERGIS: Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih memimpin jalannya paripurna bersama Bupati Sidoarjo Subandi.

forum dialog warga, diskusi publik, hingga kunjungan komunitas ke kantor dewan rutin difasilitasi. Abdullah Nasih menyebut bahwa kritik dari masyarakat, media, dan LSM adalah vitamin untuk menjaga agar DPRD tetap pada jalur pelayanan publik.

"Kritik itu bukan serangan. Justru itu bentuk perhatian agar kami tidak lengah. Saya selalu bilang ke anggota, jangan alergi dikritik. Dengarkan, evaluasi, dan benahi," tuturnya.

Dari sisi kemitraan, hubungan DPRD dengan pemerintah kabupaten juga berjalan harmonis. Meski tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, DPRD tetap menjaga etika politik dan komunikasi yang konstruktif dengan Bupati dan jajaran eksekutif.

MISI BESAR: MENJADIKAN SIDOARJO KABUPATEN ASPIRATIF DAN PARTISIPATIF

Abdullah Nasih menyampaikan bahwa DPRD Sidoarjo menargetkan untuk menjadikan kabupaten ini sebagai model daerah yang aspiratif, partisipatif, dan berbasis kolaborasi.

Ke depan, ia ingin DPRD lebih terbuka lagi terhadap teknologi dan inovasi, termasuk digitalisasi layanan aspirasi masyarakat. Platform digital seperti lapor online, e-reses, hingga forum konsultasi publik daring sedang disiapkan agar dewan bisa menjangkau lebih banyak suara warga.

"DPRD harus adaptif. Kalau rakyat sudah melek digital, kita juga harus hadir di ruang digital. Ini cara baru melayani dan menyerap aspirasi," pungkasnya.

Kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo, khususnya di bawah kepemimpinan Abdullah Nasih, mencerminkan semangat pelayanan publik yang tulus dan proaktif. Dalam era keterbukaan dan percepatan pembangunan, DPRD Sidoarjo membuktikan bahwa lembaga legislatif bisa menjadi garda depan perubahan yang berpihak kepada rakyat.

Dengan semangat kolektif, sinergi dengan masyarakat, dan semangat gotong royong, DPRD terus mengawal pembangunan menuju Sidoarjo yang inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan. (vga)



BERSINERGI: Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih saat memimpin jalannya paripurna bersama Bupati Sidoarjo Subandi.

RADAR
SURABAYA

100 Hari Kinerja Subandi-Mimik: Banyak Capaian, Evaluasi Tetap Berlanjut

SIDOARJO-Memasuki 100 hari pertama masa kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, sejumlah capaian penting telah berhasil diwujudkan. Sejumlah program strategis dalam 14 Program Prioritas mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Di antaranya penciptaan lapangan kerja, layanan kesehatan gratis, bantuan sosial, dan peningkatan infrastruktur. Namun demikian, pasangan Subandi-Mimik menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Evaluasi dan percepatan tetap menjadi fokus utama untuk mewujudkan seluruh program dalam lima tahun kepemimpinan mereka.

KONSOLIDASI OPD DAN EVALUASI LANGSUNG

Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana meminta seluruh jajaran OPD untuk aktif turun ke lapangan, tidak hanya bekerja dari balik meja. "Jangan hanya duduk di kursi. Turun ke bawah, lihat kondisi riil masyarakat. Kalau tidak turun, kita tidak akan tahu seperti apa kenyataan di lapangan," tegas Subandi didampingi Mimik Idayana. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan mendesak seperti banjir, perbaikan jalan, penerangan, dan pengelolaan sampah. Menurutnya, semua



TERJUN LANGSUNG: Bupati Sidoarjo Subandi bersama Forkopimda meninjau banjir di Jalan Raya Porong.

tantangan itu bisa diatasi dengan kolaborasi lintas OPD dan dukungan penuh dari anggaran daerah.

CAPAIAN UTAMA 100 HARI KERJA

Berikut beberapa capaian utama dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo:

1. Penciptaan 100 Ribu Lapangan Kerja
Melalui program pelatihan dan penempatan kerja, telah dilakukan 24 pelatihan yang melibatkan 1.901 peserta.

2. Layanan Berobat Gratis Cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 99,44% atau 2.016.554 jiwa

dari total penduduk 2.027.874 jiwa telah terdaftar JKN-KIS. Capaian keaktifan peserta mencapai 76,63%.

3. Program Makanan Bergizi Gratis

800 lansia dan warga miskin menerima makanan dua kali sehari. 1.175 anak yatim dari 71 yayasan menerima bantuan uang tunai. 225 penyandang disabilitas berat menerima bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan. Total realisasi anggaran mencapai lebih dari Rp 6,1 miliar.

4. Program 20 Ribu Beasiswa Beasiswa mencakup kategori prestasi, keagamaan, dan bantuan untuk keluarga kurang mampu. Saat ini masih dalam tahap verifikasi penerima secara transparan.

5. Permodalan UMKM

(Kurda)
Program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) disalurkan melalui BPR Delta Artha dengan bunga hanya 2 persen per tahun. Total pembiayaan mencapai Rp 76 miliar untuk 2.035 pelaku usaha. Target 2025 adalah 3.500 UMKM.

6. Program 20 Ribu UMKM Naik Kelas

RUAS JALAN YANG AKAN DIBETON MELIPUTI:

- ♦ Jalan Industri Buduran-Sidokepung (Buduran)
- ♦ Jalan Gedangan-Betro
- ♦ Jalan Kolonel Sugiono Kepuhkiran (Waru)
- ♦ Jalan Pabean Sedati-Ningas Waru
- ♦ Jalan Gilang-Bringinbendo (Taman)
- ♦ Jalan Wadugasri-Tambak Sawah Waru
- ♦ Jalan Wadugasri-Tambaksumur Waru
- ♦ Jalan Nasional Waru-Ningas
- ♦ Jalan Tambakrejo-Tambak Sawah Waru
- ♦ Jalan Brigen Katamso Waru
- ♦ Jalan Kalanganyar-Segoro
- ♦ Tambak (Sedati) Menuju Sidoarjo Metropolitan

Hingga 31 Mei 2025, sebanyak 3.884 usaha mikro telah naik kelas, mendekati target 4.000 UMKM tahun ini. Sebanyak 2.290 UMKM mendapatkan pendampingan, pelatihan, hingga fasilitasi pendaftaran merek.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIKEBUT

Subandi-Mimik juga menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur melalui program betonisasi jalan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Tahun ini, 11 ruas jalan dengan panjang total 8.470 meter akan dibeton dan dilengkapi saluran U-Ditch. Subandi-Mimik membawa visi besar: "Menata Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Menjadi Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan."

Dengan dukungan penuh dari seluruh OPD dan kekuatan APBD yang memadai, mereka optimistis semua program prioritas bisa diselesaikan dalam lima tahun. "Amanah ini akan kami jalankan sebaik-baiknya. 100 hari ini adalah bukti awal bahwa kami ingin bergerak cepat menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat," pungkas Wabup Mimik (vga).



DIAWASI: Bupati Sidoarjo Subandi saat meninjau pengerjaan proyek infrastruktur.



PEDULI: Bupati Sidoarjo Subandi memberikan bantuan kepada warga tak mampu.



Bupati H Subandi, SH, M.Kn

Wakil Bupati Sidoarjo HJ Mimik Idayana



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati dan Wabup Kompak Monitor Distribusi Bantuan Pangan

Sidoarjo, Memorandum

Memastikan penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat tepat sasaran, Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana kompak turun langsung ke lokasi penyaluran, Rabu (30/7).

Bupati memantau penyaluran bantuan pangan di tiga desa di Kecamatan Gedangan. Yakni Desa Tebel, Keboansikep, dan Wedi. Sementara wabup memantau penyaluran di Desa Sidokemping, Kecamatan Buduran, dan Desa Jumptrejo, Kecamatan Sukolilo.

Selain untuk memastikan penyaluran bantuan beras tepat sasaran, Sub-

andi juga ingin memastikan seluruh warga terlindungi BPJS Kesehatan. Bupati menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras kali ini untuk alokasi Juni dan Juli. Per bulan pemerintah menatah beras sebanyak 10 kg. Sehingga kali ini keluarga penerima Manfaat (KPM) langsung menerima 20 kg.

"Penyaluran bantuan

pangan beras pemerintah pusat harus dikawal bersama. Jangan sampai bantuan tersebut salah sasaran atau diterima oleh yang tidak berhak. Bantuan harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Karena bantuan ini tujuannya untuk membantu ekonomi warga dalam mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari," kata Subandi.

Dia juga meyakinkan kualitas beras bantuan yang diberikan jenis unggul. Selain itu, Bupati mengecek sendiri kondisi berasnya dan layak dikonsumsi. Oleh karenanya, ia meminta

beras yang diterima jangan sampai dijual.

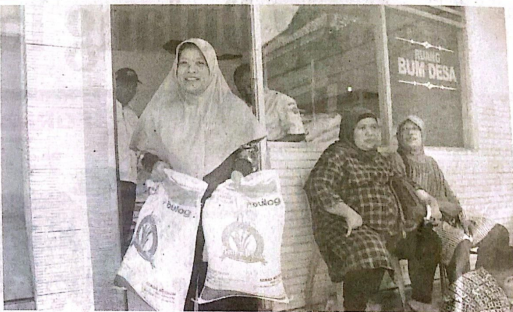
Dalam kesempatan itu Subandi juga memastikan masyarakat terlindungi BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jika masih ada yang belum, diminta agar segera menemui kepala desa setempat. Minta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar terdaftar dalam kepersertaan BPJS Kesehatan.

Pesan serupa disampaikan Wabup Mimik Idayana, untuk memastikan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan distribusi bantuan sosial

berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan.

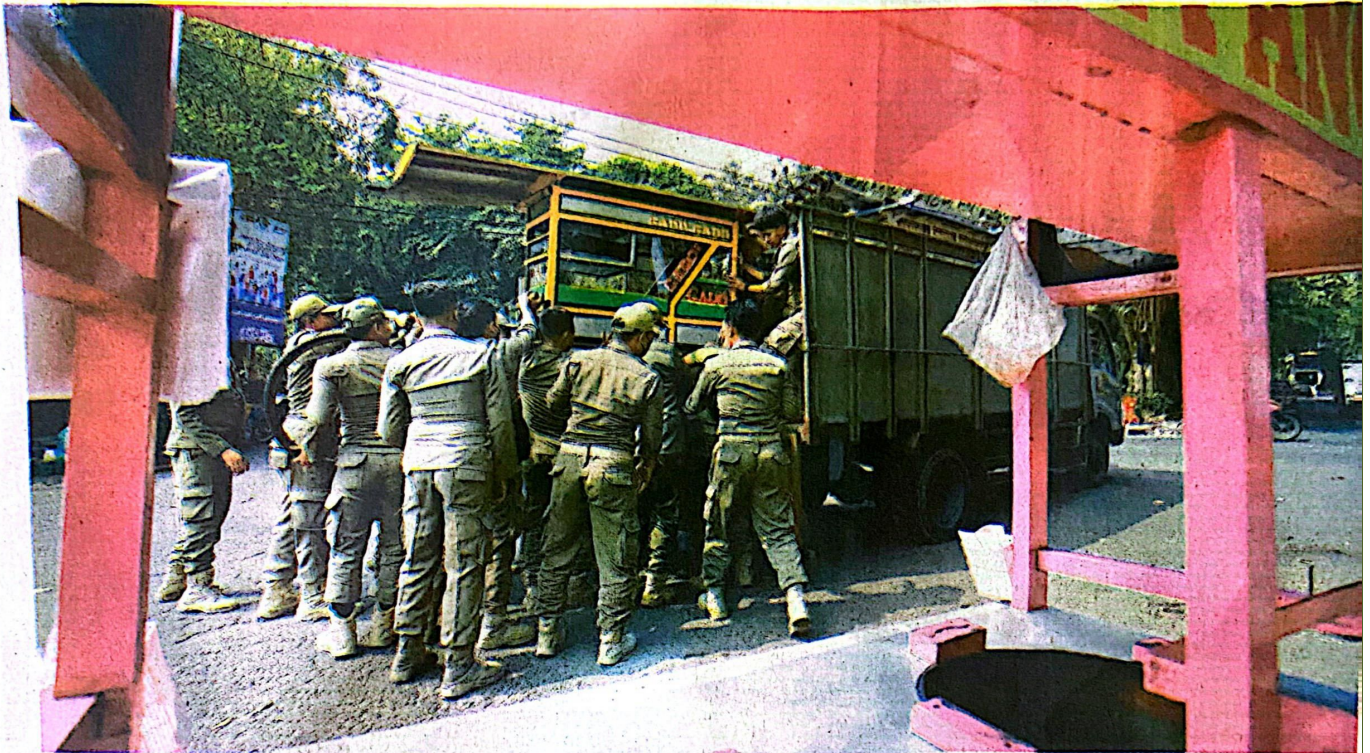
"Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, dalam kondisi layak konsumsi dan jumlah yang sesuai," ujarnya.

Siti Nurhayati (52), salah satu warga Jumptrejo mengungkapkan rasa terima kasih karena bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. "Alhamdulillah ini bantuan beras. Bisa buat masak belanja. Terima kasih Bu Wabup dan pemerintah," ucapnya sambil tersenyum. (kri/san/epe)



Warga menunjukkan 2 kantong beras bantuan pangan yang baru diterima.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



LANGGAR ATURAN: Petugas satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Sultan Agung, dekat Alun-Alun Sidoarjo, kemarin (30/7). Sebelumnya, petugas sudah memasang papan larangan berjualan di sana.

Belasan Rombong PKL di Area Alun-Alun Diangkut Satpol PP

SIDOARJO – Satpol PP Sidoarjo menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sultan Agung, sekitar alun-alun Sidoarjo, kemarin (30/7). Sebanyak 15 rombongan pedagang diangkut dengan truk. Mereka baru boleh mengambilnya setelah disidang.

Kasi Ops Satpol PP Sidoarjo R Novianto Koesno menjelaskan, kawasan itu seharusnya steril dari pedagang. Lokasinya sudah diberi papan peringatan. "Kami lakukan penindakan berupa penyiwaan sarana berjualan," jelasnya.

Novianto menambahkan,

pedagang yang melanggar tidak hanya didata. Mereka juga disanksi tindak pidana ringan (tipiring) agar jera. "Hukumannya nanti membayar denda ketika sidang," katanya.

Menurut dia, rombongan yang disita boleh diambil setelah sidang itu. Novian-

to mengungkapkan, mereka yang nantinya kembali kedapatan melanggar akan dikenakan pasal berlapis. "Jadi, areanya tetap kami pantau setelah penindakan. Dengan pasal berlapis otomatis denda-nya semakin banyak," paparnya. (edi/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Tetap Lanjutkan Pembahasan PAK

DPRD Sidoarjo tetap melanjutkan pembahasan PAK APBD 2025. PAK diyakini tetap bisa disahkan meski sebelumnya, laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan APBD 2024 ditolak.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengungkapkan, PAK dan LPJ punya *timeline* yang berbeda. Jadi, pihaknya akan tetap melakukan pembahasan. "Bagi kami sudah sangat jelas. Tidak menghambat proses PAK," katanya kemarin (30/7).

Kebijakan itu disebut sudah sesuai peraturan. Penolakan LPJ membuat penetapan penggunaan anggaran daerah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). "Nah, Perkada itu yang menjadi dasar pembahasan PAK," jelasnya.

Pihaknya tidak bisa menunggu hasil konsultasi pen-



Bagi kami sudah sangat jelas. Penolakan LPJ tidak menghambat proses PAK."

ABDILLAH NASIH

Ketua DPRD Sidoarjo

kab ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menyatakan, proses pembahasan harus tetap berjalan.

Tak Salah Prosedur

Nasih menerangkan, pembahasan itu tidak menyalahi prosedur. Dari sudut pandangnya, kalau tidak dilakukan justru keliru. "Bisa

berdampak ke agenda di belakangnya seperti pembahasan APBD 2026," ungkapnya. "Nota masuk maksimal padahal pertengahan bulan ini," sambungnya.

Lebih lanjut, PAK punya batas waktu sampai November untuk diputuskan. Disahkan atau tidak, yang terpenting tahapan pembahasan dilaksanakan dulu. "Kalau menunggu hasil konsultasi ke Kemendagri tidak mulai-mulai, padahal ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan," katanya.

Nasih menjelaskan, tahap awalnya dimulai dengan rapat badan musyawarah (banmus). Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan PAK dan paripurna. "Target kami syukur-syukur Agustus sudah kelar karena batas pengambilan keputusannya di September," tandasnya. (edi/uzi)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BANTUAN: Warga mengambil beras di Balai Desa Wedi, Gedangan, kemarin (30/7). Masing-masing keluarga menerima 20 kilogram per bulan.

4.000 Warga Dapat 80 Ton Beras Gratis

SIDOARJO – Pemerintah pusat menggulirkan bantuan pangan untuk masyarakat Sidoarjo. Sebanyak 80 ton beras disiapkan untuk penyaluran selama dua bulan, yakni Juni dan Juli. Bantuan itu menyasar sekitar 4.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing mendapat 20 kilogram beras per bulan.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan, program ini akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga menyentuh total 72 ribu KPM. Penyaluran dilakukan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Untuk dua bulan, ada se-

kitar 80 ton beras untuk disalurkan kepada warga,” ujar Subandi saat meninjau penyaluran bantuan di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, kemarin (30/7).

Untuk memastikan distribusi merata, Subandi meminta agar para kepala desa melakukan evaluasi data penerima. Jika ada warga yang dinilai sudah mampu, bisa diganti dengan yang lebih berhak menerima bantuan. “Silakan tiap kades dan ketua BPD bermusyawarah untuk menyesuaikan data penerima agar tidak timbul kecemburuan sosial,” paparnya. (eza/uzi)

Jawa Pos

Perubahan Anggaran Keuangan 2025 Terancam Gagal Disahkan

Eksekutif-Legislatif
Beda Pendapat

SIDOARJO – Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 terancam gagal. Pemkab meyakini, pengesahan PAK tidak bisa dilakukan jika Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 tidak disahkan.

Pasalnya, hari ini (31/7) menjadi batas akhir pengesahan perda tersebut. Jika gagal disahkan, Pemkab Sidoarjo terpaksa menyusun pertanggungjawaban dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dampaknya, pengesahan Perubahan APBD (PAK) 2024 dinilai akan terganjal.

Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman menegaskan, pengesahan perda itu sangat penting karena menjadi dasar hukum pembahasan dan pengesahan PAK. "Pembahasan boleh jalan, tapi soal pengesahan tetap bergantung pada status perda pertanggungjawaban ini," ujarnya.

Konsultasi ke Kemendagri Ainur menjadi delegasi Pemkab yang dikirim untuk berkonsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pasca penolakan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD 2025.

Hasilnya, baik Kemendagri maupun Pemprov berharap pengesahan tetap dilakukan lewat mekanisme legislatif, bukan Perkada. "Itu agar tahapan perubahan anggaran bisa tetap berjalan normal," imbuhnya.

Menurut Ainur, aturan mengenai tenggat pengesahan perda pertanggungjawaban tertuang dalam Pasal 194 PP Nomor 12 Tahun 2019. Di sana disebutkan bahwa pe-



TERIMA MASUKAN: Bupati Sidoarjo Subandi (dua dari kanan) hearing bersama aktivis politik soal polemik penolakan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024 kemarin (30/7). Bupati berkomitmen membuka banyak ruang dialog bagi semua pihak.

POLEMIK PEMBAHASAN PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN



- 1 LPJ penggunaan APBD 2024 ditolak DPRD Sidoarjo. Sehingga, muncul polemik pengesahan PAK tidak bisa dilakukan.
- 2 DPRD berkeyakinan PAK dapat disahkan, meskipun LPJ APBD 2024 disahkan lewat Perkada, bukan Perda.
- 3 Pemkab berkonsultasi ke Kemendagri untuk mendapat kepastian bisa atau tidak PAK disahkan.
- 4 DPRD tetap menjalankan pembahasan PAK dan menarget seluruh tahapannya bisa selesai Agustus.
- 5 Bupati sempat melakukan pertemuan dengan DPRD dan sejumlah partai pasca penolakan.
- 6 Golkar dan Gerindra tidak datang dalam pertemuan.
- 7 Asisten 1 Pemkab persilakan Dewan bahas PAK, tapi penetapan tidak bisa jika tidak ada perda pertanggungjawaban APBD sebelumnya.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

GRAFIS: HERLAMBAH/JAWA POS

ngesahan harus dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Artinya, besok (hari ini) adalah batas terakhir," tegasnya.

Jika perda tidak diketok palu oleh DPRD hingga hari ini, Pemkab harus menyusun dokumen pertanggungjawaban dalam bentuk Perkada. Namun konsekuensinya, dokumen itu tidak bisa menjadi pijakan



Pembahasan boleh jalan, tapi soal pengesahan tetap bergantung pada status perda pertanggungjawaban ini."

M. AINUR RAHMAN

Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sidoarjo

kuat untuk melanjutkan proses pengesahan PAK 2024.

"Kalau sudah jadi Perkada, statusnya berbeda. Proses PAK bisa terganjal karena dasar hukumnya tidak lagi perda," ujar Ainur.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, permasalahan raperda ini merupakan bagian dari dinamika politik antara eksekutif dan legislatif. Subandi mengaku sudah membangun komunikasi intensif dengan pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi pasca penolakan.

"Ketua partai, ketua DPRD, dan fraksi-fraksi kita ajak ngobrol bareng. Kita ajak bareng-bareng bangun Sidoarjo," katanya dalam audiensi dengan sejumlah aktivis politik kemarin (30/7). Pihaknya berharap ke depan bisa selaras dengan visi dan misi kepala daerah. "Saya support terus, koordinasi terus. Saya terbuka untuk berdialog. Apapun yang perlu saya lakukan akan saya lakukan," ujarnya. (eza/uzi)



LOEFTI/DUTA

SUDAH DIPERBAIKI : Rambu keselamatan di dekat perlintasan kereta api jalan penghubung Kajeksan-Kepunten, Kecamatan Tulangan, Rabu (30/7/25),

Kini Telah Diperbaiki

SIDOARJO - Akhirnya, rambu lalu lintas yang sempat viral karena roboh di dekat perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu, tepatnya di jalan penghubung Dusun Malangbong, Desa Kepunten dengan wilayah Kajeksan, Kecamatan Tulangan, kini telah diperbaiki dan terpasang kembali, Rabu (30/7/25).

Diberitakan sebelumnya, di media ini dengan judul :Terabaikan! Rambu Keselamatan Dekat Rel di Tulangan Roboh, Warga Khawatir Makan Korban.

Rambu yang rusak terdiri dari rambu "STOP" berbentuk segi delapan berwarna merah dan rambu segitiga kuning sebagai penanda perlintasan kereta api. Kondisi robohnya rambu tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara, khususnya yang belum familiar dengan jalur tersebut.

Wawan, warga Perumtas 3 Tulangan yang setiap hari melintasi jalur itu, mengaku sempat khawatir saat rambu-rambu tersebut tidak berfungsi.

"Rambu itu sangat membantu pengguna jalan agar lebih waspada saat melintasi rel kereta api yang menghubungkan arah Mojokerto dan Sidoarjo. Tapi karena roboh dan nyaris tak terlihat, tentu sangat membahayakan," ujarnya.

Setelah mengetahui rambu telah diperbaiki, Wawan mengaku lega dan mengapresiasi langkah cepat dari pihak terkait. Dan warga maupun pengguna jalan yang melewati rel merasa bisa lebih nyaman dengan adanya rambu tersebut.

"Terima kasih kepada Dishub Kabupaten, Dishub Provinsi, maupun PT KAI yang sudah sigap memperbaiki. Ini sangat penting untuk keselamatan kita semua," ucapnya kepada duta.co, Rabu (30/7/25). Senada, Endang (59), warga yang juga kerap melewati jalur tersebut, turut menyampaikan rasa syukur.

"Alhamdulillah, rambu-rambunya sudah kembali berfungsi. Sekarang kami sebagai pengguna jalan tidak khawatir lagi bila ada kereta lewat. Terima kasih kepada pemerintah melalui dinas terkait yang cepat merespons," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. "Karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya pengendara yang melintasi perlintasan tanpa palang pintu ini," pungkasnya. • Loe

CS Dipindai dengan CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pastikan Tepat Sasaran, Penyaluran Bantuan Pangan di Sidoarjo

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Hj. Mimik Idayana kompak turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah pusat, Rabu (30/7/25), di sejumlah desa di Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Subandi meninjau penyaluran bantuan di Desa Tebel, Keboansikep, dan Wedi, Kecamatan Gedangan. Sementara Wabup Mimik Idayana melakukan pemantauan di Desa Sidokeping, Kecamatan Buduran, dan Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono.

Penyaluran kali ini mencakup alokasi bulan Juni dan Juli. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 20 kilogram beras, masing-masing 10 kg per bulan.

"Penyaluran bantuan beras harus dikawal bersama agar tepat sasaran. Jangan sampai diterima oleh yang tidak berhak," tegas Bupati Subandi.

Bupati juga meninjau langsung kualitas beras dan memastikan tidak dijual, melainkan dikonsumsi oleh keluarga penerima manfaat.



Bupati Sidoarjo monitoring penyaluran bantuan pangan Rabu (30/7/25)

"Beras ini untuk keluarga sendiri, bukan untuk dijual. Tolong dijamin akan seperti baiknya, pesalinya."

Di samping itu, Bupati Subandi juga memastikan seluruh warga

Sidoarjo terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Warga yang belum terdaftar diminta segera mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) melalui kepala desa.

Sementara Wabup Mimik Idayana menyampaikan pesan serupa saat meninjau di dua lokasi. Ia memastikan bantuan tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan beras dalam kondisi baik.

"Kami ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, dalam kondisi layak dan jumlah yang sesuai," ujarnya.

Mimik juga berpesan agar warga aktif melapor jika menemukan persoalan seperti jalan rusak, lampu padam, atau warga yang membutuhkan bantuan, agar bisa segera ditindaklanjuti.

Dalam kunjungannya, Wabup juga menyapa langsung warga penerima manfaat. Siti Nurhayati (52), warga Desa Jumputrejo, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima.

"Alhamdulillah, terima kasih Bu Wabup dan pemerintah. Bantuan ini sangat membantu kami," ucapnya.

Senada disampaikan Widarti, warga penerima manfaat lainnya, yang merasa terbantu dengan bantuan beras karena harus menghidupi tiga anak setelah meninggal suaminya.

"Alhamdulillah, sehari saya masak satu kilo beras untuk tiga anak. Bantuan ini sangat membantu ekonomi keluarga kami," tuturnya. ●Loe



Puluhan Aktivis Mengatasnamakan Gerakan Non-Blok Desak Elit Sidoarjo Turunkan Ego



Foto: Puluhan Aktivis

mengatasnamakan Gerakan non-blok menggelar audiensi dengan Bupati Sidoarjo, Subandi terkait konflik legislatif dan eksekutif di kantor Bupati, Rabu, (30/7/2025).

SIDOARJOSATU.COM – Puluhan aktivis senior Sidoarjo yang menamakan diri 'Gerakan Non-Blok' menyuarakan kegelisahan mereka atas konflik politik yang tak kunjung usai antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Sidoarjo. Konflik ini berpusat pada penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Kelompok ini mendesak para elit politik untuk mengesampingkan ego demi kepentingan rakyat Sidoarjo.

"Besok hari terakhir. Kalau bisa ya diterima. Kalau tidak, minimal duduk bersama mencari jalan tengah," ujar salah satu tokoh Gerakan Non-Blok, Kasmuin, pada Rabu (30/7/2025).

Gerakan Non-Blok terdiri dari aktivis senior, akademisi, budayawan, hingga tokoh masyarakat. Mereka menyatakan jengah dengan kondisi politik lokal yang stagnan dan sarat konflik personal. Meski sebelumnya tidak ditemui oleh anggota legislatif, mereka akhirnya berhasil mengutarakan pendapatnya langsung kepada Bupati Sidoarjo, Subandi.

Menurut Kasmuin, pentingnya basis argumen yang rasional dan objektif dalam hal penolakan LKPJ APBD 2024. Selama ini, warga masyarakat hanya disuguhkan dengan hal-hal yang membingungkan terutama dalam perbedaan penafsiran

aturan yang ada di DPRD baik mengenai penolakan LKPJ maupun penyusunan anggaran perubahan (PAK).

"Kalau mau menolak, silahkan tunjukkan bukti. Rakyat butuh data, bukan drama. Saat ini kebingungan publik terkait perbedaan penafsiran aturan di DPRD mengenai hubungan antara penolakan LKPJ dan Penyusunan Anggaran Perubahan (PAK). Padahal, menurut Asisten Pemkab Sidoarjo, aturan sudah jelas bahwa pengesahan perda perubahan APBD bisa dilakukan setelah disahkan Perda LPP APBD tahun sebelumnya," tegasnya.

Menurutnya, gerakan ini menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan ketiga, penyeimbang, dan penjaga nalar publik yang tidak berpihak pada kubu eksekutif maupun legislatif.

"Kami ini rakyat biasa. Tapi kalau rakyat yang 'memecat' pejabat lewat suara dan kepercayaan, bisa," tambahnya.

Gerakan Non-Blok ini menjadi pengingat bahwa partisipasi warga, terutama dari generasi senior yang sarat pengalaman, tetap relevan dalam menjaga demokrasi lokal. Ketika elit sibuk bertikai, rakyat tetap menuntut solusi, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Sidoarjo yang lebih dewasa, sejahtera, dan berdaya.

Koordinator Gerakan Non-Blok, Hariadi mengungkapkan kekecewaannya atas penolakan LKPJ yang dinilai tidak perlu terjadi dan berpotensi memiliki dampak yang luas. Menurut Hariadi, penolakan LKPJ tidak hanya berdampak pada tertundanya PAK tetapi juga menghambat pembangunan di Sidoarjo.

"Ini adalah sebuah kegelisahan dari kelompok masyarakat independen yang melihat bahwa ada pertikaian yang menghasilkan sebuah penolakan terhadap LKPJ, yang sebetulnya tidak perlu terjadi, karena akan berimbas ke mana-mana," ujar Hariadi prihatin.

Sebelumnya, upaya mereka mencari kejelasan dengan meminta audiensi (hearing) ke Ketua DPRD dan anggotanya tidak membuahkan hasil, bahkan dengan alasan pemberitahuan surat yang mendadak.

Sementara Aktifis Serikat Nelayan NU Sidoarjo' Badrus Zaman menggunakan analogi ikan untuk mengkritik elit politik Sidoarjo.

"Jangan jadikan Sidoarjo seperti kolam lele. Kita ini kelasnya Arwana, harus tampil tenang tapi bernilai tinggi," ungkap Badrus.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kritik Statemen Asisten Tata Pemerintahan, Ini Solusi Pembahasan PAK APBD 2025 Agar Tetap Bisa Berjalan

SIDOARJO (liputansidoarjo.com) –

Statemen Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sidoarjo, Ainur Rahman, AP., M.Si. yang menyatakan penetapan PAK APBD 2025, bisa jadi terbentur kendala pada aturan PP No 12 tahun 2019 khususnya pasal 179 ayat 3 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dibantah dengan tegas oleh pemerhati tata pemerintahan dan politik Urip Prayitno SH, MH.



Urip menyatakan, bahwa kekhawatiran Pemkab Sidoarjo tersebut tidak rasional dan tidak berdasar.

“Pemkab Sidoarjo kan sudah bikin Perkada, jadi jangan berpikir menginginkan Perda LPP APBD 2024 yang sudah ditolak DPRD. Di dalam Perkada itu kan pasti memuat tentang Silpa 2024, untuk dibahas dalam PAK bersama dewan. Jadi gak perlu ragu membahas PAK dengan Perkada” ujar Urip meyakinkan.

Masih menurut Urip Prayitno, langkah membuat Perkada, sudah tepat dilakukan setelah proses LPP APBD 2024 ditolak.

Selanjutnya, Perkada ini digunakan sebagai dasar untuk membahas PAK 2025.

“Jangan membuat narasi yang menakutkan, seolah-olah PAK tidak bisa dibahas karena hanya menggunakan Perkada,” terangnya.

Liputan Sidoarjo.com

Urip menyatakan, secara Substantif Hubungan LPP APBD 2024 dan Perubahan APBD 2025 adalah terkait SILPA 2024 yang menjadi Sumber Pendapatan pada Pembahasan Perubahan APBD 2025.

“Pada 23 Juli 2024 Pemkab Sidoarjo sudah menyampaikan Perkada LPP APBD 2024 ke Gubernur jadi sejak itu semestinya sudah tutup permabahasan terkait Perda LPP APBD 2024 yang sudah ditolak DPRD. Karena kalau masih membahas Perda, maka itu bentuk inkonsistensi Pemkab. Perlu kita ketahui di dalam Perkada LPP APBD 2024 dan Perkada Penjabarannya telah memuat tentang Silpa 2024, jadi berikutnya tinggal menunggu pengesahan perkada dari gubernur untuk selanjutnya SILPA yang termuat dari ketetapan Perkada itulah secara definitif menjadi landasan pembahasan perubahan APBD dalam membahas sumber pendapatan apalagi sudah LHP BPK APBD 2024 (Audited)” Jelasnya.

Berikut isi dari PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 179 ayat (3) yang dijadikan dasar asistensi 1 bahwa pembahasan PAK kemungkinan terganjal.

“Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya.”

Apakah Pasal 179 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 mengganjal pembahasan perubahan anggaran? Dari berbagai sumber yang dihimpun, pasal ini secara formal bisa jadi ganjalan. Namun jika DPRD menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD, kepala daerah bisa menetapkannya melalui Perkada (berdasarkan Pasal 197 PP 12/2019).

Maka, ketentuan Pasal 179 ayat (3) tidak mengganjal secara total, karena masih ada jalur hukum alternatif lewat Perkada.

Solusi Jika LPP APBD Ditolak DPRD:

PP 12/2019 Pasal 197 ayat (1–4) memberi jalan keluar:

Jika DPRD tidak mengambil keputusan dalam waktu 1 bulan, kepala daerah menetapkan LPP APBD dengan Perkada.

Setelah Perkada LPP ditetapkan, maka Ketentuan Pasal 179 ayat (3) dianggap telah terpenuhi, meskipun bukan melalui Perda.

Apakah APBD-P tetap bisa dibahas? Iya melalui Perkada (Pasal 197)

Apakah ini mengganjal pembahasan? Hanya jika kepala daerah tidak segera menetapkan Perkada LPP.

Sementara itu, dari informasi yang diterima, pada Kamis (31/7/2025) hari ini, diagendakan paripurna pembacaan nota masuk perubahan anggaran APBD 2025, setelah pada Rabu kemarin Bamus berhasil melakukan rapat penjadwalan. (Abidin)

Didesak Lakukan Upaya Islah/Kompromi Politik, Bupati Subandi Sesumbar Akan Tetap Tegak Lurus Dan Tak Takut Hadapi Apapun



Bupati Sidoarjo H. Subandi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Fenny Apridawati dan sejumlah pejabat lain saat menemui puluhan aktivis dari berbagai elemen yang meminta audiensi terkait persoalan Sidoarjo yang saat ini semakin tidak kondusif.

Kordinator GNB Harivadi Siregar dan Kasmin saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media usai beraudiensi dengan Bupati Subandi. (Dilla)

DIMENSINEWS.COM SIDOARJO: Bupati Sidoarjo Subandi merespon serius desakan puluhan aktivis eksponen 98 dan kalangan akademisi kampus Sidoarjo yang tergabung dalam Gerakan Non Blok (GNB) yang meminta Subandi untuk melakukan berbagai upaya kompromi politik terkait semakin tidak kondusifnya kondisi politik di Sidoarjo pasca penolakan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Bupati Sidoarjo Tahun 2024 oleh mayoritas anggota DPRD pada sidang Paripurna beberapa waktu lalu. Subandi malah sesumbar akan melawan apa dan siapapun pihak yang berniat membuat kegaduhan di Sidoarjo.

"Saya akan tetap tegak lurus untuk memerangi segala bentuk tindakan yang mengarah ke korupsi. Saya tidak akan takut menghadapi apa dan siapapun. Lillaahita'ala. Pak karena tidak ada kepentingan lain selain bagaimana menata Sidoarjo menjadi lebih baik. Sebagai pemimpin saya hanya ingin selamat tidak bernasib seperti 3 bupati."

sebelumnya ya g terierat perkara hukum"tegas Subandi saat berkesempatan meniajawab keluhan puluhan aktivis senior di ruang Off Room Sekretariat Pemkab Sidoarjo Rabu (30/7) siang hingga sore tadi.

Lebih lanjut Subandi mengaku bahwa kegaduhan yang terjadi belakangan ini adalah bagian dari upayanya dalam merubah mind set berfikir semua pemangku kebijakan agar Sidoarjo ke depan tidak lagi teriebak dalam kesalahan dalam menata keuangan agar tidak terierumus kembali dalam perkara korupsi.

"Itu semua saya lakukan agar Sidoarjo bisa lebih baik Itu prinsip saya" tandasnya dengan intonasi sedikit tinggi.

Sementara terkait isu keretakan hubungan dengan Wabup Mimik Idayana Bupati menyatakan tidak ada permasalahan dan sudah membagi tugas.

"Sampai saat ini saya hubungan dengan Wakil bupati baik-baik saia Wabuo ingin sidak silahkan. ingin manggil OPD silahkan. InsyaAllah kita tidak ada konflik. Kalau ada yang membuat konflik, saya tidak bisa jawab, ya mudah mudahan 'beliau' nanti sadarlah," ujar bupati tanpa menielaskan siapa yang dimaksud dengan kalimat beliau ini.

Lebih lanjut meniajawab uneg-uneg para aktivis terkait pertanyaan berlarut-larutnya konflik politik antara dirinya dan lembaga DPRD serta apa saja solusi yang telah dilakukan guna menyudahi kegaduhan Subandi menielaskan bahwa ia bersama dengan semua pejabat OPD telah berupaya melakukan berbagai pendekatan agar tercapai kompromi politik.

"Termasuk tuntutan agar saya meminta maaf atas statemen saya yang telah dianggap melecehkan dewan sudah saya lakukan" timpal Subandi.

Namun bila semua hal tersebut dipandang masih belum cukup hingga berujung ditolaknya LPP APBD Tahun 2024,"saya bingung harus gimana meniawabnya Faktanya dokumen LKPJ APBD tahun 2024 mendapat penilaian/predikat Wajar tanpa pengecualian(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)"ungkap Subandi.

Pernyataan sekaligus penielasan Subandi ini meniajawab uneg-uneg puluhan aktivis dan tokoh Sidoarjo yang tergabung dalam Gerakan Non Blok Sidoarjo, melakukan audensi dengan Bupati Sidoarjo Subandi.

Langkah audensi dengan Bupati ini, digelar setelah beberapa jam sebelumnya gerakan non blok ini gagal beraudensi dengan DPRD Sidoarjo.

Hadir dalam acara audiensi ini beberapa aktivis senior diantaranya KH Ghofar Mistar, Kasmuin, Hariadi Siregar, Sugeng Santoso, Nanang Haromian, Badrus Zaman, Slamet Budiono, Totok Santoso, serta beberapa aktivis lain.

Sedangkan dari pihak eksekutif, hadir langsung Bupati Sidoarjo, Sekretaris Daerah, para asisten serta beberapa pejabat lainnya.

Kordinator LSM Centre for Participatory Development (CePad) Sidoarjo Kasmuin saat mendapat kesempatan pertama menyampaikan sikap keprihatinan menyatakan langkah aktivis untuk audensi ini sebagai bentuk kekhawatiran akan kondisi Sidoarjo saat ini.

"Kita bersama sama melakukan gerakan ini, sebagai bentuk kekhawatiran akan kondisi pembangunan Sidoarjo akibat tidak diterimanya LKPJ 2024," ujar aktivis kawakan ini lugas.

Kasmuin menyatakan, langkah kekhawatiran ini diharapkan bisa mendapatkan jawaban yang pas baik dari eksekutif maupun legislatif, sehingga kedepannya bisa lebih baik.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi C DPRD Sidoarjo Tinjau Lapangan Pasca Pembangunan Drainase di Pasar Tarik

Sidoarjo, Wartanusa.net – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), bekerja sama dengan Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, melaksanakan peninjauan lapangan terhadap pasar-pasar tradisional yang telah mengalami proses pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kualitas pembangunan, keberfungsian fasilitas publik, serta kenyamanan para pedagang dan pengunjung.

Peninjauan ini dijadwalkan dalam beberapa tahap, pada empat pasar utama, yakni Pasar Tarik, Pasar Watutulis, Pasar Sukodono, dan Pasar Kedungrejo. Kegiatan ini dimulai pada Rabu, 23 Juli 2025, di Pasar Tarik. Kemudian, dilanjutkan di Pasar Watutulis pada Kamis, 24 Juli 2025, Pasar Sukodono pada Rabu, 30 Juli 2025, dan terakhir di Pasar Kedungrejo pada Kamis, 31 Juli 2025. Dalam setiap kunjungan, dua orang dari total delapan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo akan turut serta melakukan evaluasi langsung di lapangan.

Di hari pertama, Pasar Tarik menjadi lokasi awal yang dikunjungi. Dua anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, Zakaria Dimas dan Prabata Ferdiansyah, turun langsung untuk meninjau kondisi fisik pasar, dengan fokus utama pada infrastruktur drainase dan sistem pengelolaan sampah. Peninjauan ini dilakukan bersama jajaran petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

Zakaria Dimas menekankan pentingnya keberadaan pasar tradisional sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Ia menyampaikan bahwa kondisi fisik pasar yang baik sangat mendukung kegiatan perdagangan sehari-hari. "Pasar tradisional adalah salah satu penggerak ekonomi rakyat. Infrastruktur yang baik, terutama drainase yang lancar dan sistem persampahan yang tertata, menjadi kunci kenyamanan pedagang dan pengunjung,



Muh. Zakaria Dimas Pratama, S.Kom dan Prabata Ferdiansyah Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo saat tinjau ke Pasar Tarik. (Foto: Dok/wartanusa.net)



Kami ingin memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pedagang dan warga," ujarnya.

Zakaria juga menyampaikan perlunya sinergi yang kuat antara pengelola pasar dan pihak dinas terkait. Menurutnya, pembangunan fisik harus disertai dengan perencanaan jangka panjang mengenai perawatan rutin dan pemeliharaan fasilitas. Ia menambahkan bahwa tidak jarang proyek pembangunan pasar hanya fokus pada tahapan awal, namun mengabaikan pemeliharaan jangka panjang yang justru lebih penting untuk memastikan fungsi fasilitas terus berjalan optimal.

Senada dengan hal tersebut, Prabata Ferdiansyah menyoroti pentingnya keberlangsungan program pengawasan terhadap pasar-pasar yang telah direnovasi. Ia menyampaikan, "Kami mendorong pengelola pasar dan dinas terkait agar tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik saja, tetapi juga menjaga kebersihan dan kelancaran drainase secara berkala. Sistem pengelolaan sampah juga harus lebih diperhatikan agar tidak menumpuk dan menimbulkan masalah kesehatan."

Ia menambahkan bahwa dalam peninjauan tersebut ditemukan beberapa titik drainase yang mulai tersumbat karena kurangnya perawatan. "Kalau tidak segera ditindaklanjuti, bisa menimbulkan banjir di lingkungan pasar saat musim hujan. Ini tentu mengganggu aktivitas pedagang dan pengunjung," jelas Prabata. Ia berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa menindaklanjuti temuan tersebut dengan cepat.

Kegiatan peninjauan yang dilakukan Komisi C DPRD ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program Disperindag. Evaluasi ini sangat penting sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan program kerja di tahun-tahun mendatang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, SH, menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan keterbukaan atas semua masukan dari DPRD.

"Kami sangat terbuka atas semua masukan. Tugas kami bukan hanya membangun, tapi juga memastikan bahwa setiap pembangunan berdampak positif secara jangka panjang," kata Widiyantoro. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif DPRD dalam pengawasan yang menurutnya memperkuat kualitas program pembangunan daerah.

Widiyantoro menambahkan, pengawasan lapangan semacam ini merupakan bagian dari sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik. "Kami ingin setiap kegiatan pembangunan yang didanai dari APBD benar-benar kembali manfaatnya kepada masyarakat," jelasnya.

Selain aspek drainase dan kebersihan, hasil peninjauan juga menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sarana pendukung lain seperti tempat sampah permanen, jalur evakuasi darurat, serta sistem pencahayaan yang baik untuk meningkatkan keamanan di dalam pasar, terutama saat pagi dan sore hari.